



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN TEKOLABBUA**

Alamat : Jl. Pelelangan Kelurahan Tekoilabbua Kecamatan Pangkajene Kode Pos 90612

**KEPUTUSAN LURAH TEKOLABBUA
NOMOR 017 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN TEKOLABBUA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEKOLABBUA**

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Keputusan Lurah Tekolabbua

Nomor : 017

Tanggal : 25 Juli 2025

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan

Keputusan Lurah Tekolabbua

Nomor : 017

Tanggal : 25 Juli 2025

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45).

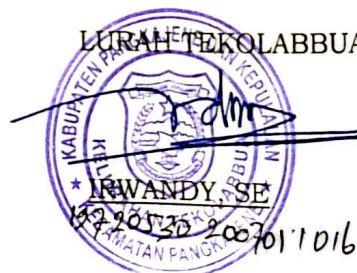
MEMUTUSKAN;

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Tekolabbua, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Tekolabbua untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberkulosis;
 - melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberkulosis;
 - membantu UPT Puskesmas Bonto Perak dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberkulosis; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Lurah Tekolabbua.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Lurah Tekolabbua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tekolabbua
pada tanggal

2025

LURAH TEKOLABBUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TEKOLABBUA
NOMOR 017
TANGGAL 25 Mei 2015
TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN TEKOLABBUA KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN TEKOLABBUA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- I Pembina : Lurah Tekolabbua
- II Pengarah : Sekretaris Kelurahan Tekolabbua
Kapolsek Pangkajene
Danramil 1421 - 06 Pangkajene
- III Ketua : Kepala Seksi Kessos Kelurahan Tekolabbua
- IV Wakil Ketua : Kepala UPT Puskesmas Bonto Perak
- V Sekretaris : Pj.Program TB .UPT Puskesmas Bonto Perak
- VI Bendahara : Kepala Sub Bagian Perencanaan Kelurahan
Tekolabbua
- VII Sekretariat Forum : Kantor UPT Puskesmas Bonto Perak
- VIII Koordinator Bidang Pemerintahan : Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan
Tekolabbua
- IX Koordinator Bidang Swasta/Dunia Usaha : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas
Sibatua
- X Koordinator Bidang Akademisi : Koordinator Pengendalian Penyakit Menular UPT
Puskesmas Bonto Perak;
- IX Koodinator Bidang Komunitas : Pj.Surveilans UPT Puskesmas Bonto Perak;
- XII Koordinator Bidang Media : Pj.Promosi Kesehatam UPT Puskesmas Bonto
Perak
- XIII Sektor/Bpidang Pemerintahan
Ketua : Lurah Tekolabbua
Anggota : 1. Kepala UPT Puskesmas Bonto Perak
2. Pengawas PLKB Kelurahan Tekolabbua
3. Ketua K3S Kelurahan Tekolabbua
4. Ketua PGRI Kelurahan Tekolabbua
5. Kepala Kelurahan Tekolabbua
- XIV Sektor/Bidang Swasta/Dunia Usaha
Ketua : PJ.Kesehatan Kerja UPT Puskesmas Bonto Perak
Anggota : 1. PJ.Jaminan Kesehatan Nasional UPT
Puskesmas Bonto Perak
2. PT. SUR (Satwa Utama Raya)
- XV Sektor/Bidang Komunitas/LSM/CSO
Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Tekolabbua
Anggota : 1. Badan Amil Zakat Kelurahan Tekolabbua;
2. Karang Taruna se Kelurahan Tekolabbua;
3. Bidan Untuk Negeri Dompot Dhuafa
- XVI Sektor/Bidang Akademisi/Perguruan Tinggi/Asosiasi
Ketua : Direktur STAI DDI Pangkajene dan Kepulauan;
Anggota : 1. Kepala SMA 20 Pangkep;
2. Pimpinan DDI / Pesantren se Kelurahan
Bonto Perak;

3. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi
Kelurahan Tekolabbua;

XVII Sektor/Bidang Media

Ketua

Anggota

: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pangkajene;

1. Ketua Dewan Masjid Kecamatan Pangkajene
2. Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
3. Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
4. Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan;
5. Pj Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
UPT Puskesmas Bonto Perak.

